

Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan di Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Ni Made Riana Darmayanti¹, I Putu Mega Juli Semara Putra^{2*}, I Dewa Made Endiana³
^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*
*Email: megaebat@unmas.ac.id

ABSTRACT

Sustainability reports have become a major issue over the past 10 years in relation to company growth. Companies need information regarding the extent to which they have carried out social activities to justify that the rights of surrounding communities have been fulfilled. This study aims to examine and obtain empirical evidence of the effect of board of commissioners' size, audit committee size, institutional ownership, managerial ownership, and firm size on sustainability report disclosure in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study consists of 30 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 29 companies with three years of observation, thus obtaining 87 research samples. The data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that firm size has a positive effect on sustainability report disclosure in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, while the size of the board of commissioners, audit committee size, institutional ownership, and managerial ownership have no effect on sustainability report disclosure in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

Keywords: Board of Commissioners Size, Audit Committee Size, Institutional Ownership, Firm Size, Sustainability Report Disclosure.

PENDAHULUAN

Isu mengenai keberlanjutan saat ini menjadi concern karena perusahaan dituntut tidak hanya berorientasi pada keuntungan namun juga memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitarnya (Acar, et al., 2021). Keadaan ini terjadi karena para pemangku kepentingan khawatir akan bahaya dari proses bisnis dari suatu perusahaan dan menekan perusahaan untuk mengungkapkan kontribusi mereka terhadap masalah perubahan iklim dan lingkungan melalui laporan keberlanjutan (Acar et al., 2021). Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur, memahami, dan mengomunikasikan kinerja perusahaan dalam aspek keuangan (Adnyana & Adwishanti, 2020).

Belakangan ini laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan cenderung mendapat kritik karena perusahaan hanya mengungkapkan kinerja positif tanpa mengungkapkan kinerja negatif mengenai keberlanjutan perusahaan (Alfiana, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menerapkan prinsip pelaporan yang transparan dalam laporan keberlanjutannya (Farooq et al., 2021). Guna mengatasi hal tersebut serta meningkatkan dan akuntabilitas laporan keberlanjutan, Aprilia & Yanti (2024) merekomendasikan perusahaan untuk melakukan penilaian untuk mengidentifikasi masalah material bagi perusahaan serta pemangku kepentingan, sehingga isi laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan harapan dan kepentingan legitimasi

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) jadi isu utama sepanjang 10 tahun terakhir ini terpaut dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan membutuhkan informasi

mengenai sejauh mana perusahaan sudah melakukan aktivitas sosialnya untuk membenarkan jika hak-hak warga dekat sudah terpenuhi. Dimana dikala ini industri tidak cuma tertuju pada pencapaian keuntungan, melainkan pula wajib fokus mengenai akibat sosial, serta lingkungan (Ardiani, et al., 2022). Pengungkapan laporan keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di industri. Forum for *Corporate governance in Indonesian* (FCGI), yang mengembangkan Pedoman *Good Corporate governance*, mendefinisikan Good Corporate governance sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen industri, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang lain ataupun sesuatu sistem yang mengendalikan serta mengatur suatu industri (Dewi & Ramantha, 2021). Pengungkapan sustainability report ialah mekanisme serta konsekuensi nyata dari implementasi Good Corporate Governance yang mempunyai prinsip kalau stakeholder membutuhkan atensi, baik dalam perihal ketentuan yang terdapat dan menjalankan kerjasama yang aktif buat kelangsungan hidup jangka panjang antara stakeholder dengan industri (Dewi, et al., 2025).

Teori legitimasi merupakan salah satu pendekatan dalam akuntansi sosial dan lingkungan yang menjelaskan bagaimana organisasi berusaha memastikan bahwa kegiatannya dianggap sah dan dapat diterima oleh Masyarakat. Dalam laporan sector energi, teori legitimasi digunakan untuk memahami motivasi di balik pengungkapan informasi non-keuangan seperti informasi sosial, lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan (CSR). Dalam sektor energi, teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan informasi non-keuangan seperti CSR dalam sustainability report tidak hanya untuk memberi informasi kepada pemangku kepentingan, tetapi juga untuk membangun dan mempertahankan citra bahwa perusahaan beroperasi sesuai ekspektasi masyarakat, terutama saat terjadi krisis reputasi. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) mendorong transparansi melalui sustainability report sebagai bentuk tanggung jawab kepada mitra dan investor, terlebih karena sektor energi memiliki dampak lingkungan yang besar sehingga perusahaan dituntut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan.

Indonesia berkomitmen mencapai *Net Zero Emission* 2060 dan melalui POJK No.51/POJK.03/2017 mewajibkan emiten menyusun sustainability report, namun implementasinya di sektor energi belum merata karena perusahaan besar lebih mampu menerapkan ESG dibandingkan perusahaan menengah ke bawah yang terbatas sumber daya. Tekanan investor dan peluncuran Indeks ESG Leaders oleh BEI dan OJK semakin mendorong transparansi, sehingga ukuran perusahaan dan tata kelola menjadi faktor penting dalam pengungkapan keberlanjutan, meskipun hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh GCG terhadap sustainability report masih menunjukkan temuan yang beragam. Interaksi antara *good corporate governance* (GCG), ukuran perusahaan, dan tekanan eksternal menunjukkan fenomena yang bersifat campuran. Efek GCG dapat diperkuat atau justru dilemahkan oleh ukuran perusahaan serta tekanan dari pihak eksternal. Sebagai contoh, perusahaan berukuran besar dengan kualitas GCG yang lemah tetap rentan terhadap kritik publik, tekanan organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*/NGO), serta risiko divestasi. Sebaliknya, perusahaan besar yang memiliki GCG yang kuat cenderung menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan terverifikasi.

Beberapa studi juga mengidentifikasi adanya variabel moderasi, seperti kinerja harga saham, kepemilikan institusional, serta karakteristik sub-sektor industri (misalnya batu bara dibandingkan dengan energi terbarukan), yang memengaruhi sejauh mana GCG dan ukuran perusahaan mendorong praktik pengungkapan. Dengan demikian, kombinasi antara GCG yang efektif dan kapasitas perusahaan yang memadai dapat memaksimalkan kualitas pelaporan, namun pengawasan eksternal dari media dan investor tetap memainkan peran yang krusial. Implikasi kebijakan dan praktik menunjukkan adanya pergeseran fokus dari sekadar kuantitas pengungkapan menuju kualitas pelaporan. Tingginya tingkat pelaporan mencerminkan

peningkatan transparansi formal, tetapi otoritas dan pemangku kepentingan pasar—seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta investor perlu mendorong penguatan standar pelaporan. Hal ini mencakup harmonisasi metodologi penghitungan emisi, kewajiban assurance independen, serta pengembangan mekanisme penilaian kualitatif yang lebih ketat.

Dalam rangka memperkuat analisis empiris mengenai interaksi antara good corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, dan praktik pengungkapan keberlanjutan, kajian ini juga mempertimbangkan fenomena kontekstual yang terjadi pada perusahaan sektor energi di Indonesia selama periode 2022–2024. Dalam periode tersebut, sejumlah perusahaan energi berskala besar mendapat sorotan publik terkait dugaan praktik greenwashing, khususnya pada tahun 2023. Salah satu perusahaan yang banyak dibahas oleh media dan pengamat lingkungan adalah Adaro, yang dinilai masih mengembangkan proyek pembangkit dan industri berbasis batu bara pada fase tertentu, meskipun dalam laporan keberlanjutannya menyatakan komitmen terhadap transisi energi hijau. Fenomena ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang besar serta keberadaan sustainability report tidak secara otomatis menjamin keselarasan antara pengungkapan keberlanjutan secara formal dan praktik operasional yang dijalankan perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 2024, tekanan dari pemangku kepentingan eksternal, khususnya investor global dan mitra bisnis internasional, turut memengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan sektor energi di Indonesia. Tekanan tersebut tercermin dari pembatalan memorandum of understanding (MoU) yang bersifat non-binding antara perusahaan multinasional dan salah satu emiten sektor energi nasional. Kekhawatiran terhadap emisi karbon yang masih tinggi akibat penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil menjadi faktor utama yang mendorong keputusan tersebut. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa tekanan eksternal dapat berdampak langsung pada konsekuensi komersial perusahaan, bahkan ketika perusahaan telah melakukan pengungkapan keberlanjutan dalam laporan resminya. Dengan demikian, legitimasi pengungkapan keberlanjutan tidak hanya dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari persepsi dan respons para pemangku kepentingan.

Selain itu, sepanjang periode 2023–2024, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan peneliti independen secara aktif menerbitkan laporan investigatif terkait praktik operasional perusahaan pertambangan dan energi berskala besar. Laporan-laporan tersebut menyoroti berbagai isu lingkungan dan sosial, seperti potensi konflik dengan masyarakat sekitar, degradasi lingkungan, serta dugaan ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku. Dampak dari laporan investigatif ini tidak hanya meningkatkan tekanan reputasi perusahaan, tetapi juga mendorong tuntutan transparansi yang lebih besar serta perlunya audit eksternal sebagai bentuk verifikasi independen. Temuan ini menegaskan bahwa pengungkapan keberlanjutan yang bersifat formal perlu didukung oleh tata kelola perusahaan yang efektif serta mekanisme pengawasan dan verifikasi yang memadai agar informasi yang disampaikan memiliki kredibilitas.

Secara keseluruhan, fenomena-fenomena tersebut memperkuat argumen bahwa hubungan antara GCG, ukuran perusahaan, dan pengungkapan keberlanjutan bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada tingkat atau luas pengungkapan keberlanjutan (*extent of disclosure*), tetapi juga mempertimbangkan konteks tata kelola perusahaan dan peran pengawasan eksternal sebagai faktor penting yang memengaruhi kualitas dan kredibilitas pelaporan keberlanjutan, khususnya pada perusahaan sektor energi di Indonesia.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Teori Legitimasi menjelaskan bahwa setiap organisasi atau Perusahaan beroperasi berdasarkan kontrak social dengan Masyarakat. Legitimasi merupakan persepsi atau asumsi bahwa Tindakan Perusahaan sesuai dengan norma, nilai dan kepercayaan social yang berlaku di lingkungannya. Dengan kata lain, legitimasi Adalah bentuk —izin sosial untuk beroperasi (license to operate).

Secara keseluruhan, teori legitimasi memberikan kerangka konseptual untuk memahami mengapa GCG dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. GCG yang baik membantu perusahaan memenuhi ekspektasi sosial melalui mekanisme akuntabilitas dan transparansi, sedangkan ukuran perusahaan menentukan kapasitas serta urgensi untuk mempertahankan legitimasi publik. Dalam konteks sektor energi di Indonesia, kombinasi antara tata kelola yang kuat dan skala operasi yang besar menjadi kunci bagi perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan memperluas legitimasi sosial di tengah meningkatnya tuntutan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Good Coporate Governance (GCG)

Governance Good Coporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang. Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (stakeholder), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Akibat yang muncul dari pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan masalah seperti *corporate social responsibility* (CSR). Kebijakan dan tata kelola suatu perusahaan pada masa mendatang harus lebih memperhatikan kebutuhan dari para stakeholder. Pengungkapan (disclosure) atas aspek ekonomi (*economic*), lingkungan (*environmental*), dan sosial (*social*) merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Praktik pengungkapan tersebut dikenal sebagai sustainability reporting atau triple bottom line reporting, sebagaimana direkomendasikan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI).

Sustainability Report

Sustainability reporting berlandaskan pada konsep akuntansi berkelanjutan, yaitu pendekatan pelaporan yang tidak hanya menitikberatkan pada kinerja ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma pelaporan korporasi dari orientasi laba semata menuju penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akuntansi berkelanjutan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui integrasi indikator non-keuangan ke dalam laporan perusahaan. Indikator tersebut mencakup, antara lain, pengukuran emisi dan jejak karbon, pengelolaan dampak lingkungan, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui pengungkapan yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak aktivitas operasionalnya secara menyeluruh, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih terinformasi.

Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan Terbatas, maka wajib memiliki

paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen.

Komite Audit

Dalam Pedoman GCG Indonesia Putri & Surifah (2023) dijelaskan bahwa, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Sofa & Respati (2020) menyatakan tujuan dibentuknya komite audit antara lain melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan pelaporan ENERGI dan pelaksanaan audit, pengawasan independen atas pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independent terhadap proses pelaksanaan corporate governance.

Kepemilikan Institusional

Susadi & Khoolmi (2021) menyatakan bahwa Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Institutional shareholders, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Investor institusional memiliki power dan experience serta bertanggungjawab dalam menerapkan prinsip corporate governance untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.

Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan Saham Manajerial (*Managerial Ownership*) adalah kondisi di mana manajer atau pihak internal perusahaan (seperti direksi dan dewan komisaris) memiliki saham di perusahaan tersebut. Kepemilikan ini dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik perusahaan (principal) sebagaimana dijelaskan dalam *Agency Theory*. Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Dalam konteks penelitian dan tata kelola perusahaan, kepemilikan manajerial sering dijadikan variabel independen yang berpengaruh terhadap berbagai aspek seperti kebijakan dividen, struktur modal, manajemen laba, serta kinerja perusahaan di *sector energy*.

Ukuran Perusahaan

Tahar & Rachmawati (2020) mengatakan ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Sementara Acar, et al., (2021) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian perusahaan menjadi besar dan kecil yang dapat diukur berdasarkan total aset perusahaan. Adnyana & Adwishanti (2020) menyatakan perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan informasi bukan hanya untuk keperluan internal saja, namun besar kemungkinan memperoleh keuntungan-keuntungan ketika mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela yang memadai.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Dewan komisaris independen ada untuk melaksanakan prinsip fairness atau kesetaraan pada pelaksanaan GCG, dimana perusahaan diharuskan untuk memperhatikan kepentingan legitimasi tanpa melakukan perbedaan perlakuan terhadap sebagian besar maupun sebagian kecil pihak (Syofyan, 2021). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar mencerminkan keberagaman keahlian dan perspektif yang dimiliki perusahaan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan yang lebih kuat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi, termasuk melalui pengungkapan laporan keberlanjutan, sebagai sarana untuk mempertahankan legitimasi sosial di mata publik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Septiyanti (2022) serta Mandagie et al. (2024) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Berdasarkan teori legitimasi dan temuan empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Komite audit merupakan bagian penting dari penerapan Good Corporate Governance yang berfungsi membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, pengawasan yang efektif akan mendorong perusahaan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari pemangku kepentingan. Ukuran komite audit yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena adanya pembagian tugas dan keahlian yang lebih memadai. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan upaya mempertahankan legitimasi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ramantha (2021) serta Madona dan Khafid (2020) menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Meskipun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil berbeda, secara teoritis ukuran komite audit yang memadai tetap diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₂: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Pengaruh ukuran kepemilikan institusional terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Kepemilikan saham institusional mencerminkan keterlibatan investor profesional yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dalam perspektif teori legitimasi, investor institusional memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas yang sesuai dengan norma sosial dan lingkungan guna menjaga reputasi dan keberlanjutan investasi. Semakin besar kepemilikan saham institusional, semakin kuat tekanan yang diberikan kepada manajemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2025), Hidayati dan Retnani (2020), serta Farooq et al. (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Berdasarkan landasan teori dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₃: Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Kepemilikan saham manajerial merupakan kondisi ketika manajemen perusahaan juga berperan sebagai pemilik. Berdasarkan teori agensi, kondisi ini dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Dari perspektif teori legitimasi, manajemen yang memiliki saham akan lebih berhati-hati dalam menjaga reputasi perusahaan karena reputasi tersebut berdampak langsung terhadap nilai kepemilikan mereka. Pelaporan keberlanjutan menjadi salah satu sarana bagi manajemen untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan saham manajerial, semakin besar pula dorongan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yanto (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄: Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Pengaruh ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat visibilitas dan kompleksitas aktivitas perusahaan di mata publik. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berukuran besar cenderung menghadapi tekanan sosial, politik, dan lingkungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar memiliki kebutuhan yang lebih tinggi untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial. Sebagai respons atas tekanan tersebut, perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas guna menunjukkan kepatuhan terhadap norma sosial dan tanggung jawab lingkungan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kuncorowati et al. (2021) serta Kristianingrum et al. (2022) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₅: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan cara mengakses situs resmi BEI, yaitu <https://www.idx.co.id/>. Pemilihan lokasi di BEI, karena BEI merupakan bursa pertama di Indonesia yang dianggap memiliki data tentang keuangan dan informasi mengenai perusahaan yang lengkap dan telah terorganisir dengan baik.

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, termasuk komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen (Madona & Khafid, 2020). Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, diharapkan fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif.

UDK= Jumlah Dewan Komisaris

Keterangan:

Nilai UDK diperoleh dari total individu yang duduk sebagai dewan komisaris dalam laporan tahunan perusahaan.

Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit mengindikasikan jumlah anggota komite audit yang membantu dewan komisaris dalam menilai efektivitas pengendalian internal, kepatuhan, dan kualitas pelaporan keuangan. Semakin besar ukuran komite audit, semakin kuat sistem pengawasan internal perusahaan (Mandagie et al., 2022).

UKA = Jumlah anggota komite audit

Keterangan:

Nilai UKA diperoleh dari jumlah keseluruhan anggota komite audit yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan investasi. Menurut Mujiani & Jayanti (2021), kepemilikan ini meningkatkan fungsi pengawasan karena institusi cenderung menuntut transparansi yang lebih tinggi dari manajemen. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Rumus:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

KI dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan total saham yang beredar, kemudian dikalikan 100 persen untuk mendapatkan persentase kepemilikan.

Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan seperti direksi dan komisaris. Berdasarkan teori keagenan oleh Jensen dan Meckling, semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Rumus:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Nilai KM diperoleh dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari total saham perusahaan yang beredar.

Ukuran perusahaan

Pratiwi & Merina (2024) mengatakan ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada penelitian kali ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{total asset})$$

Keterangan:

Nilai SIZE diperoleh dari logaritma natural total aset perusahaan. Penggunaan logaritma bertujuan untuk menstabilkan data dan mengurangi perbedaan skala antar perusahaan.

Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Pengungkapan laporan keberlanjutan yaitu sejauh mana perusahaan menyajikan informasi terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Purbandari & Suryani (2021), pengungkapan ini merupakan bagian penting dari pelaporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Pengukuran dilakukan menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{SRD} = \frac{\text{Jumlah Indikator yang Diungkapkan}}{\text{Jumlah Total Indikator GRI}} \times 100\%$$

Keterangan:

Nilai SRD diperoleh dengan membandingkan jumlah indikator pengungkapan yang benar-benar diungkapkan perusahaan dengan jumlah total indikator GRI yang seharusnya diungkapkan, kemudian dikalikan 100 persen untuk mendapatkan tingkat pengungkapan dalam bentuk persentase.

Penentuan Populasi dan Sampel

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, artinya sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan sampel yang dapat memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Berikut kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024.
2. Perusahaan sektor energi yang mempublikasikan laporan terintegrasi dan sustainability report pada periode 2022-2024.
3. Kepemilikan Saham: Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham oleh pihak manajemen (manajemen memiliki saham perusahaan) selama periode 2022-2024.

Dari kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat ditentukan sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 29 perusahaan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas adalah pertama metode observasi non-partisipan, yakni dengan membuka dan mengunduh data-data yang diperlukan melalui website yaitu www.idx.co.id. Pengumpulan data pendukung lainnya untuk penelitian ini diperoleh dari buku, e-book, artikel publikasi nasional dan internasional serta melalui laporan publikasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang valid.

Teknik Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari seluruh variabel penelitian baik variabel independen maupun dependen.

Melalui analisis ini, dapat diketahui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel, sehingga dapat memberikan pemahaman awal mengenai sebaran dan kecenderungan data yang digunakan dalam penelitian. Setelah data dideskripsikan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara lima variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$SRD = \alpha + \beta_1UDK + \beta_2UKA + \beta_3KI + \beta_4KM + \beta_5SIZE + e$$

Keterangan:

SRD : Pengungkapan Sustainability report

α : Konstanta

UDK : Dewan Komisaris

UKA : Komite Audit

KI : Kepemilikan Saham Institusional

KM : Kepemilikan manajerial

SIZE : Ukuran Perusahaan

β : Koefisien Regresi

e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UDK	87	3.00	7.00	4.9310	1.37073
UKA	87	3.00	5.00	4.0115	.82820
KI	87	55.08	84.36	69.2148	8.14239
KM	87	1.01	4.85	2.9128	1.12038
SIZE	87	30.42	33.15	32.2662	.75610
SRD	87	60.44	92.31	75.9633	9.46638
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data diolah (2025)

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	5.362	9.591		.559
	UDK	-.592	.785	-.070	-.754
	UKA	-.115	1.283	-.009	-.090
	KI	-.086	.131	-.076	-.657
	KM	.828	.965	.077	.857
	SIZE	2.395	.448	.686	5.350

a. Dependent Variable: SRD

Sumber: Data diolah (2025)

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga H_1 ditolak. pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan kewajiban bagi perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 44 pasal 66 ayat 2 dan pasal 74 Tahun 2007 mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan paragraf 9 (Sembilan) secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab masalah lingkungan dan sosial dalam laporan tambahan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Hidayat & Farida (2021) dan Kartika, et al., (2023) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Hipotesis kedua menyatakan Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. komite audit lebih dominan fokus kepada pengawasan laporan keuangan dan audit internal, bukan kepada isu lingkungan atau sosial khususnya dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Komite audit lebih berfungsi memperkuat pengawasan komisaris terhadap perusahaan dan lebih banyak menangani penyelesaian temuan audit serta penelaahan pengaduan, ketimbang memperluas pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofa dan Respati (2020), Farooq et al., (2021) dan Ulfa, et al., (2025) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Hal ini disebabkan karena para investor institusional hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi saja tanpa mempedulikan tanggung jawab perusahaan pada *stakeholder* lainnya. Kondisi ini mencerminkan kepemilikan di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi sehingga para investor institusi ini cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Khairunnisa & Sulfitri (2024) dan Khoiriyah, et al., (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis keempat

(H₄) ditolak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang turut memiliki saham sering kali memiliki kepentingan pribadi yang mendorong manajerial lebih selektif dalam menyampaikan informasi keberlanjutan kepada publik. Manajerial cenderung mempertimbangkan potensi risiko reputasi atau konsekuensi financial jika informasi tertentu menampilkan kinerja keberlanjutan perusahaan secara kurang menguntungkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2022) serta Milawati dan Abdillah (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Hipotesis kelima menyatakan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis kelima (H₅) diterima. Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat visibilitas dan kompleksitas aktivitas perusahaan di mata publik. Berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan berukuran besar cenderung menghadapi tekanan sosial, politik, dan lingkungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Perusahaan besar, terutama yang beroperasi di sektor publik, dituntut lebih transparan mengenai dampak lingkungan dan sosial mereka. Oleh karena itu, perusahaan besar memiliki kebutuhan yang lebih tinggi untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuncorowati et al. (2021) serta Kristianingrum et al. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian menyimpulkan sebagai berikut.

1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Acar, D. A. E., Zhao, Y., Navarro, R. M., Mattina, M., Whatmough, P. N., & Saligrama, V. (2021). Federated Learning Based on Dynamic Regularization. Arxiv Preprint Arxiv:2111.04263.
- Adnyana, I. M., & Adwishanti, P. R. (2020). Good Corporate governance, Ukuran Dewan Komisaris, Net Profit Margin dan Ukuran Perusahaan Efeknya terhadap Pengungkapan Indonesia Periode 2015-2018. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 234-259.

- Alfiana, N. (2021). Penghindaran Pajak, Laporan Keberlanjutan, Corporate governance Dan Nilai Perusahaan: Dimoderasi Ukuran Perusahaan. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 14-27.
- Aprilia, F., & Yanti, H. B. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate governance Pada Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 1051-1058.
- Ardiani, N. P. F., Lindrawati, L., & Susanto, A. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate governance Terhadap Pengungkapan Sustainability report Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. (JRAMB) *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1).
- Astiti, N. P. Y. (2024). Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Good Corporate governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1162-1170.
- Damayanti, A., & Hardiningsih, P. (2021). Determinan pengungkapan laporan berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 175.
- Damayanti, P. M. D., & Septiyanti, R. (2022). Pengaruh Corporate social responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), dan ukuran perusahaan terhadap kinerja ENERGI pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship (EFEBE)*, 1(1), 71-83.
- Dewi, I. A. S. P., & Ramantha, I. W. (2021). Good Corporate governance, Ukuran Perusahaan, dan Sustainability report dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1451.
- Dewi, I. P., Ariani, K. R., & Kurniawati, L. (2025). Pengungkapan Sustainability report: Peran Kinerja ENERGI, Good Corporate governance, dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 61-79.
- Endiana, I. D. M., Sudana, I. P., Ariyanto, D., & Dwija, I. G. A. M. A. (2025). Sustainability reporting quality on corporate reputation: the role of political and military connections. *Economics and Environment*, 92(1), 918-918.
- Farooq, F., Ahmed, W., Akbar, A., Aslam, F., & Alyousef, R. (2021). Predictive Modeling For Sustainable High-Performance Concrete From Industrial Wastes: A Comparison And Optimization Of Models Using Ensemble Learners. *Journal Of Cleaner Production*, 292, 126032.
- Hidayat, D. F. N., & Farida, F. (2021, October). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, Good Corporate governance, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 748-764).
- Hidayati, B. S., & Retnani, E. D. (2020). Pengaruh Struktur Modal, Good Corporate governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(6).
- Kartika, S. E., Puspitasari, W., & Khoriah, D. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 86-104.
- Khairunnisa, E., & Sulfitri, V. (2024). Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal ekonomi trisakti*, 4(1), 235-244.
- Khoiriyah, Y., Swissia, P., & Olivia, V. (2020, October). Pengaruh Good Corporate governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Sustainability report. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, pp. 13-23).
- Kristianingrum, A., Sukesti, F., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate governance, Kinerja ENERGI, dan Struktur Modal terhadap Pengungkapan Sustainability report. In *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* (Vol. 5).

- Kuncorowati, F. P., Miqdad, M., & Roziq, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan Good Corporate governance terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility dan dampaknya terhadap abnormal return pada perusahaan LQ45. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 78-94.
- Kusumawardani, A. M. T. (2022). Pengaruh Good Corporate governance dan Ukura Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability report serta Dampaknya terhadap Return Saham: Studi Empiris pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2020. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3724-3742.
- Madona, M. A., & Khafid, M. (2020). Pengaruh Good Corporate governance Terhadap Pengungkapan Sustainability report Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19(1), 22-32.
- Mandagie, Y., Fujianti, L., & Afifah, N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainable Reporting (Studi Empiris Pada Perusahaan Peraih Indonesia Sustainability reporting Award Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(1), 19-34.
- Milawati, S.A., & Abdillah, P. (2025) Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Sustainability Report Studi Kasus Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024. *Center of Economic Student Journal*, 8(4): 1352-1369.
- Mujiani, S., & Jayanti, J. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate governance Terhadap Sustainability report Pada Perusahaan Peserta ISRA Di Indonesia. *Akunnsa*, 18(1).
- Nofita, W., & Sebrina, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate governance Dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan Sustainability report. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(3), 1034-1052.
- Pratiwi, D. H., & Merina, C. I. (2024). Pengaruh Good Corporate governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability report pada Perusahaan Sektor Energi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 163-177.
- Purbandari, Y., & Suryani, R. (2021). Good Corporate governance Terhadap Sustainability reporting. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 242-254.
- Puspitaningrum, H. Y., & Indriani, A. (2021). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Good Corporate governance terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Leverage sebagai Variabel Kontrol (Pada Sektor Perusahaan Consumer Goods Industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *Diponegoro Journal of Management*, 10(4).
- Putri, A. D., & Surifah, S. (2023). Pengaruh Leverage dan Good Corporate governance terhadap Pengungkapan Sustainability report (Studi Empiris Pada BUMN Periode 2016-2020). *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 31-42.
- Rahmat, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Implementasi Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 7(2), 222–236.
- Respati, N. D. (2020). The Adoption Of E-Government In The Tax Administration: A Scoping Review. *Scientax*, 1(2), 109-130.
- Salsabilla, A. I., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2022). Pengaruh mekanisme Good Corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan bumh. *Jurnal riset mahasiswa akuntansi*, 2(3), 394-406.
- Sofa, F. N., & Respati, N. W. (2020). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017). *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1): 39-51.

- Sofa, F. N., & Respati, N. W. (2020). The Effect Of The Board Of Directors, Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, Profitability, And Company Size On Sustainability report Disclosure (Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange, 2017). *Journal Of Economics And Business*, 13(1).
- Sriningsih, S., & Wahyuningrum, I. F. S. (2022). Pengaruh comprehensive stakeholder pressure dan Good Corporate governance terhadap sustainability report. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(1), 813-827.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susadi, M. N. Z., & Kholmi, M. (2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability report. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 129-138.
- Syofyan, R. (2021, November). Student Learning Motivation In Online Learning During The Covid-19 Pandemic. In *Seventh Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business And Management, Accounting And Entrepreneurship (PICEEBA 2021)* (Pp. 279-282). Atlantis Press.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh mekanisme corporate governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1).
- Ulfa, R., Harjanti, A.E., & Wijayanti, S. (2025) Pengaruh good corporate governance, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sustainability report. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 22(1): 53-64